

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan tertinggi dan alasan utama kemerdekaan Negara Indonesia diperjuangkan. Pembangunan yang didasari dengan niat meningkatkan kualitas setiap individu yang tinggal dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi kekuatan sekaligus pendorong pemerintah selaku penyelenggara kehidupan berbangsa untuk terus berusaha merealisasikan cita-cita NKRI yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pembangunan nasional sebagai “puncak” hierarki memiliki turunan yakni pembangunan daerah yang merupakan pendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi yang terpadu pada setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan pada masing-masing jenjang agar “garis besar” arah pembangunan dapat terwujud sesuai harapan.

Tujuan nasional dalam Undang-Undang Dasar yang secara aplikatif tertuang dalam program-program pembangunan nasional menjadi rujukan oleh setiap pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Dengan terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka akan terjadi keselarasan pencapaian tujuan pembangunan melalui pelaksanaan setiap tahapan perencanaan secara efektif dan efisien. Meskipun begitu, keselarasan saja tidak cukup untuk mewujudkan pembangunan berkualitas, perlu adanya perencanaan pembangunan yang matang, relevan, dan konsisten terhadap pembangunan daerah agar hasil akhir yang dicapai sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.

Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian pembangunan nasional melalui sumber daya yang dimiliki. Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Timur maupun masyarakat Republik Indonesia secara global. Meskipun pencapaian pembangunan yang positif telah diraih, namun dalam memasuki era liberalisasi ekonomi perlu adanya ketahanan pembangunan dalam menghadapi tantangan yang ditawarkan. Upaya mendasar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam

memposisikan diri di masa mendatang adalah dengan memahami kondisi riil berbagai bidang maupun sektor yang berkembang di Provinsi Kalimantan Timur saat ini, capaian kinerja yang telah diraih pada periode sebelumnya, permasalahan dan hambatan yang terus mengiringi program kegiatan pembangunan, dan isu-isu strategis yang relevan dengan keadaan Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan masa mendatang.

Perkebunan merupakan salah satu subsektor strategis yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, secara ekonomi subsektor perkebunan berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta memperkuat struktur ekonomi wilayah dan nasional. Sedangkan secara ekologi, subsektor perkebunan berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, serta penyangga kawasan lindung. Dalam kerangka sosial budaya, subsektor perkebunan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sektor pertanian cukup besar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, evaluasi pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan masa lampau menjadi titik awal perencanaan pembangunan subsektor perkebunan di masa mendatang dengan memperhatikan bidang-bidang terkait lainnya sebagai pendukung pencapaian tujuan pembangunan sektoral.

## **B. Keadaan Umum Wilayah**

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah sekitar 12.734.691 ha yang terdiri dari daratan seluas 12.638.892 ha dan perairan darat seluas 95.799 ha. Selain wilayah darat, Kalimantan Timur juga memiliki pengelolaan laut (0-12 mil) seluas 3.997.373 ha. Sebagai provinsi terluas ketiga, Kalimantan Timur memiliki luas wilayah mencapai 6,66 persen dari luas wilayah Indonesia. Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) tingkat II berstatus kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu) dan 3 (tiga) kota (Balikpapan, Bontang dan Samarinda).

Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Kutai Timur dengan luas sebesar 3.105.170 Ha atau 24,38 persen dari total luas wilayah Kalimantan Timur,

sedangkan Kabupaten dengan luas terkecil adalah Kabupaten PPU yang hanya memiliki luas sebesar 292.373 Ha atau 2,29 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk luas wilayah perkotaan, dari total luas wilayah 3 kota hanya memiliki wilayah sebesar 1,09 persen saja.

Posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 4o 24' Lintang Utara (LU) dan 2o 25' Lintang Selatan (LS), 113o 44' Bujur Timur (BT) dan 119o 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Utara : Kalimantan Utara

Timur : Selat Makasar dan Laut Sulawesi

Selatan : Kalimantan Selatan.

Barat : Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).

Berdasarkan kelerengan atau kemiringan lahan dan ketinggian tempat, karakteristik topografi Kalimantan Timur didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 40% dan ketinggian kurang dari 500 meter dpl. Kondisi demikian akan mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Lahan datar (0-2%) di Kalimantan Timur pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai-sungai besar yang luasnya sekitar 10,70 persen dari total wilayah. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai (2-15%) luasnya mencapai 16,16 persen. Sisanya, lahan berbukit dengan tingkat kelerengan > 15% dengan luasnya mencapai sekitar 73,14 persen dari luas wilayah Kalimantan Timur.

Pengembangan tanaman pangan hanya mungkin dilakukan di daerah yang datar hingga landai atau wilayah dengan kemiringan 0-15 persen. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan yang lebih tinggi (>15 persen) hanya cocok untuk tanaman tahunan dan kawasan konservasi.

Jenis tanah di wilayah daratan Kalimantan Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning latosol dan litosol yang tersebar di bagian Tengah dan Utara Kalimantan Timur. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. Jenis tanah ini sesuai untuk usaha pertanian, kebun campuran, pertanian sayur-sayuran dan hutan.

Berdasarkan aspek hidrologi, wilayah Kalimantan Timur memiliki keunggulan dimana potensi sumberdaya air yang berasal dari sungai diperkirakan sebesar 325.380 juta m<sup>3</sup> per tahun dan potensi sumberdaya air yang berasal dari danau dan waduk sebesar 42.917 juta m<sup>3</sup>.

Aliran sungai mengarah dari barat ke timur yang seluruhnya bermuara di pantai timur Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, Kalimantan Timur diidentifikasi memiliki wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Sebagai dasar dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan daerah, penataan ruang nasional telah mengatur pembentukan kawasan untuk meningkatkan ekonomi pada pusat pertumbuhan yaitu dengan Kawasan Andalan. Kawasan andalan merupakan bagian dari kawasan budidaya yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya. Kawasan Andalan Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan sekitarnya
- Kawasan Andalan Sangkulirang – Sengatta - Muara Wahau (SASAMAWA).
- Kawasan Andalan Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam dan sekitarnya (BONSAMTEBAJAM) dan sekitarnya.
- Kawasan Andalan Laut Bontang – Tarakan dan sekitarnya.

Selain itu dalam strategi pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Kalimantan Timur menjadi bagian dalam koridor ekonomi Kalimantan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”.

Dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi namun juga pengembangan wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan. Secara berkelanjutan, pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah ditetapkan kawasan strategis provinsi dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah provinsi serta potensi dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya, yaitu :

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi: (1) Kawasan industri dan Pelabuhan Maloy di kabupaten Kutai Timur ; (2) Kawasan agropolitan regional di kabupaten Kutai Timur; dan (3) Kawasan pusat pertambangan regional (klaster pertambangan) di kabupaten Kutai Timur.
2. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi terdapat di Kabupaten Kutai Barat.

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi meliputi : (1) Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu ; (2) Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai di Kabupaten Kutai Kartanegara ; serta (3) Desa budaya Pampang di Kota Samarinda.
4. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi meliputi : (1) Kawasan Delta Mahakam ; (2) Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran, dan sekitarnya ; (3) Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan) ; dan (4) Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.

### C. Sekilas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 dan memasuki awal Pelita I (April 1969) Dinas Karet diubah namanya menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur. Pada perkembangan selanjutnya melalui Perda Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Perda Nomor 06 tahun 1984 menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Perda Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004. Perubahan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Provinsi, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur nomor 08 tahun 2004 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

#### D. Landasan Hukum

Landasan hukum di dalam penyusunan Laporan Tahunan 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

#### E. Rencana Strategis 2013 - 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, bahwa Renstra SKPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari renstra SKPD. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra SKPD selama lima tahun. Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai dasar bagi seluruh *stakeholders* subsektor perkebunan dan setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Isu-isu strategis serta analisis *strengths, weaknesses, opportunities* dan *threats* (SWOT).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terkait dengan perencanaan kebijakan maupun program/kegiatan. Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan, sebagai berikut :

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan perkebunan
- Kinerja layanan jasa ekosistem dari kawasan bernilai konservasi tinggi terhadap usaha perkebunan

Isu strategis merupakan permasalahan pokok maupun tantangan yang berkaitan dengan fenomena global baik regional, nasional, maupun internasional baik yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya maupun situasi baru yang muncul akibat perubahan era. Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan subsektor perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun ke depan, meliputi :

- Pembangunan Sejuta Hektar Kelapa Sawit Tahap Kedua
- Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan
- Integrasi Sawit – Sapi
- Pembangunan Perkebunan Daerah Perbatasan
- Pemberdayaan Masyarakat Miskin

#### 1. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh komponen *stakeholder* pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 46 tahun 2008, maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan melalui pembangunan subsektor perkebunan selama tahun 2013-2018 adalah ***"Terwujudnya Perkebunan yang Tangguh untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau"***

Setelah perumusan visi pembangunan di subsektor perkebunan, tahapan selanjutnya adalah menjabarkan visi tersebut menjadi misi-misi yang akan diemban oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama masa periode perencanaan pembangunan daerah. Pernyataan perwujudan visi melalui misi-misi Dinas Perkebunan dimaksudkan agar setiap elemen kelembagaan Dinas Perkebunan maupun pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui, mengenal, dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan setiap detail misi yang telah disepakati. Oleh sebab itu, dalam setiap peranan Dinas Perkebunan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan yang jelas terutama dalam merealisasikan misi-misi sebagai berikut:

- 1.1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan
- 1.2. Meningkatkan Kualitas Dan Nilai Tambah Produk
- 1.3. Memperkuat Aspek Kelembagaan Dan Pemasaran
- 1.4. Mengembangkan Perkebunan Yang Berkelanjutan

## 2. Tujuan

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis, **tujuan** dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Program Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

- 2.1. Misi Pertama adalah Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan, yang mempunyai tujuan Meningkatkan produksi perkebunan,
- 2.2. Misi Kedua adalah Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk, yang mempunyai tujuan Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional dan Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi.
- 2.3. Misi Ketiga adalah Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran, yang mempunyai tujuan Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani serta pemasaran dan Meningkatkan peran pembinaan aparatur.
- 2.4. Misi Keempat adalah Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan, yang mempunyai tujuan Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan.

## 3. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- 3.1. Tujuan pertama, "Meningkatkan produksi perkebunan" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya produksi kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, dan lada, dengan indikator sebagai berikut:
  - Jumlah produksi (ton per tahun) setiap komoditas,



- Tingkat produktivitas (ton/hektar per tahun) setiap komoditas, dan
  - Penambahan luas kebun (hektar) setiap komoditas.
- 3.2. Tujuan kedua, "Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional, dengan indikator sebagai berikut:
- Persentase produk yang bersertifikasi (%).
- 3.3. Tujuan ketiga, "Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan, dengan indikator sebagai berikut
- Persentase penerapan teknologi ramah lingkungan (%).
- 3.4. Tujuan keempat, "Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya Kesejahteraan petani pekebun, dengan indikator sebagai berikut
- Jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan
- 3.5. Tujuan kelima, "Meningkatkan peran dan pembinaan aparatur" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan, dengan indikator sebagai berikut:
- Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun
- 3.6. Tujuan keenam, "Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan" dapat dicapai dengan sasaran Menurunnya gas emisi rumah kaca subsektor perkebunan, dengan indikator Jumlah kegiatan yang dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pertahun. Sasaran kedua adalah Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan yang menerapkan prinsip-prinsip perkebunan yang berkelanjutan, diantaranya menerapkan ISPO/RSPO, dengan indikator Jumlah dan luas areal perusahaan perkebunan yang menerapkan ISPO/RSPO.

#### 4. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah baik secara umum maupun sektoral. Sedangkan Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepahaman melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, &

Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1. Korelasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

Visi: Terwujudnya Perkebunan Yang Tangguh Untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1: Meningkatkan produksi komoditi perkebunan				
1.	Meningkatkan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi, produktivitas, dan terbangunnya kebun kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, & lada	Peningkatan produksi perkebunan	Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan
				Meningkatkan luas areal perkebunan
				Penurunan tingkat gangguan usaha dan konflik perkebunan
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk				
2.	Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional	Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional	Pembinaan kelompok-kelompok usaha penghasil produk	Penyediaan teknologi budidaya, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil
				Penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar
3.	Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi	Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan	Peningkatan proses pengolahan komoditas perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi pengolahan
Misi 3: Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran				
4.	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani pekebun	Penguatan/optimalisasi kelembagaan petani dan kemitraan pemasaran komoditi	Peningkatan kemandirian kelompok tani/gapoktan
				Pengembangan asosiasi petani pekebun
				Peningkatan kemitraan kelompok tani
				Peningkatan kapasitas koperasi sekunder pertanian
5.	Meningkatkan peran dan pembinaan aparatur	Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur fungsional teknis perkebunan	Rekrutmen dan pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kelembagaan
Misi 4: Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan				
6.	Mewujudkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Menurunnya emisi gas rumah kaca subsektor perkebunan	Penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Pencegahan dan pengurangan emisi limbah perkebunan

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menggambarkan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2014, Laporan Tahunan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pengantar Laporan Tahunan Tahun 2014 berupa Latar Belakang, Keadaan Umum Wilayah, Sekilas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Landasan Hukum dan Rencana Strategis 2013-2018. Bab ini juga memuat Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.

### **BAB II ORGANISASI**

Bab ini berisi Penjabaran Organisasi berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, meliputi ; tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta Sumber Daya Manusia.

### **BAB III ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**

Bab ini berisi korespondensi, Asset yang tersedia serta Aspek Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.

### **BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN**

Bab ini berisi ringkasan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 yang dirangkum ke dalam kesimpulan serta Rencana Tindak Lanjutnya.